**PENGAWASAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(DPMD) KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP USAHA EKONOMI
KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) PERDANA MANDIRI
SEJAHTERA TAHUN 2017**

Oleh : **Muhammad Izzan Subpriadi**

Email: *Izzanmuhammad955@gmail.com*

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The weak selection process for the feasibility of beneficiaries of funds and during assistance in using the Village Economic Business Fund-Savings and Loans (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera has an impact on the amount of refunds that have been distributed not in accordance with expectations, this is due to weak supervision carried out so that the employees do their own way without paying attention to what has become a reference.

The formulation of the research problem is how is the supervision of the Bengkalis Community and Village Empowerment Service (DPMD) on the Economic Business of the Perdana Mandiri Sejahtera Village of Savings and Loans (UEK-SP) in 2017 ?, and what factors are obstacles to the supervision of the Community and Village Empowerment Service (DPMD)) Bengkalis Regency to Perdana Mandiri Sejahtera Economic Business Village (UEK-SP) in 2017 ?.

The research objective was to determine the supervision of the Bengkalis Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) on the Economic Business of the Perdana Mandiri Sejahtera Village of Savings and Loans (UEK-SP) in 2017, and to determine the factors that become obstacles in the supervision of the Community and Village Empowerment Service (DPMD) Bengkalis Regency on the Economic Business of the Perdana Mandiri Sejahtera Savings and Loan Village (UEK-SP) in 2017

Supervision of the Bengkalis Community and Village Empowerment Service (DPMD) is only guided by the rules made by UEK-SP, determining the measurement of the implementation of activities in 2 ways, namely visiting directly to the business location and by telephone followed by sending data via e-mail, measurement implementation is to directly conduct checks in the field, in comparing the implementation, it is found that there are implementation standards that are not in accordance with the implemented practice, the inhibiting factor in supervision is the not yet established implementation standards and limited human resources.

Keywords: *Supervision, Savings and Loan (UEK-SP) Urban Village Economic Enterprises*

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki bagian pada urusan bersama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan suatu warga. Di Indonesia kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat dengan sistem dana bergulir yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah lembaga keuangan mikro di tingkat kelurahan.

Kecamatan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan, dimana disatu-satunya kelurahan yang ada yaitu Kelurahan Bukit Batu telah berdiri Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang diberi nama Perdana Mandiri Sejahtera. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera dibentuk sebagai wujud dari usaha untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkalis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang berperan dalam membantu kepala daerah untuk penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah.

Pengawasan di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di Kabupaten Bengkalis disebutkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan tugas dari Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis. Adapun tugas yang menyangkut Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi permodalan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi usaha kredit mikro.

Menurut Inu Kencana Syafii (2003:62) pengawasan adalah menjamin segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan tidak keluar dari rel yang sudah digariskan. Sedangkan monitoring hanyalah mengikuti perkembangan,

sekaligus mengantisipasi terjadinya kendala dan mencari solusinya. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap kearah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional, disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang.

Lemahnya pengawasan menyebabkan para pegawai berbuat semaunya sendiri tanpa memperhatikan apa yang telah menjadi acuan dalam pemberian dana dan pendampingan. Sehingga proses seleksi kelayakan pemanfaat dana maupun pada saat pendampingan pemanfaat dana dalam menggunakan dana Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera hanya menjadi formalitas saja, sehingga berdampak kepada jumlah pengembalian dana yang telah disalurkan kepada pemanfaat dana tidak sesuai dengan harapan atau banyak pemanfaat dana yang tidak mampu mengembalikan dana bergulir.

Adapun fenomena permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya :

- 1) Pada tahun 2017 ada penurunan total pencairan dana sebesar Rp 936.500.000 dibandingkan dengan total pencairan dana pada tahun 2016
- 2) Pada tahun 2017 ada penurunan sebanyak 48 orang pemanfaat dana dibandingkan dengan tahun 2016
- 3) Terjadi penurunan pencairan dana yang dialokasikan untuk bidang

usaha dagang, jasa, industri kecil, kebun, dan tani, pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

- 4) Penyebab dari penurunan total pencairan dana pada tahun 2017 dibandingkan dengan pada tahun 2016 adalah jumlah pengembalian dana yang telah disalurkan kepada pemanfaat dana tidak sesuai dengan harapan atau banyak pemanfaat dana yang tidak mampu mengembalikan dana tersebut.
- 5) Pemanfaat dana yang tidak mampu mengembalikan dana tersebut diantaranya karena ada indikasi masih lemahnya saat proses seleksi kelayakan pemanfaat dana maupun pada saat pendampingan pemanfaat dana dalam menggunakan dana tersebut.

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah ***“Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Tahun 2017”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera tahun 2017?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera tahun 2017.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi (Fahmi, 2017:138).

T. Hani Handoko (dalam Fahmi, 2017:139) menyatakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sedangkan Brantas (dalam Fahmi, 2017:139) berpendapat pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Pengawasan adalah menjamin segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan tidak keluar dari rel yang sudah digariskan. Sedangkan monitoring hanyalah mengikuti perkembangan, sekaligus mengantisipasi terjadinya kendala dan mencari solusinya. Pengawasan itu berjenis diantaranya pengawasan ekonomis, pengawasan politik dan lain-lain. Karena kajian tulisan ini adalah pengawasan yang

berkonotasi, hingga masuk pada persoalan keintelan dalam mengikuti situasi wilayah, inilah yang dimaksud monitoring (Syafie, 2003:62).

Secara umum ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya pengawasan pada suatu organisasi, yaitu:

- a. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Pengawasan memiliki peran dalam membantu dan mengawal untuk mewujudkan keinginan visi dan misi.
- c. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan.
- d. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuh kembangkan keyakinan para *stakeholders* pada organisasi. *Stakeholders* adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi (Fahmi, 2017:141).

Handayani (2005:32) mengatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Beberapa metode pengawasan yang dapat digunakan, antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan langsung
Yaitu apabila aparat pengawasan/pemimpin organisasi melaksanakan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verikatif atau sistem investigatif.
- b) Pengawasan tidak langsung
Yaitu apabila aparat pengawas/pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.
- c) Pengawasan formal (resmi)

Yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/aparat pengawasan dari pemimpin organisasi tersebut.

d) Pengawasan non formal (tidak resmi)

Yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan, biasanya dilakukan melalui kunjungan yang tidak resmi untuk menghindari kekakuan antara atasan dan bawahan.

e) Pengawasan administratif

Yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.

f) Pengawasan teknis

Yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Pemeriksaan ini meliputi jenis kuantitatif dan kualitatif serta biaya yang dikeluarkan.

Tahap-Tahap dalam proses pengawasan menurut Usman Effendi (2011:54-55):

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Ada tiga bentuk standar yang umum digunakan dalam manajemen sebagai berikut:

a. Standar-standar fisik

Mungkin meliputi barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk.

b. Standar-standar moneter yang ditujukan dalam rupiah

Mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan dan sejenisnya.

c. Standar-standar waktu

Meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*)

maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

a. Pengamatan (*observasi*).

b. Laporan-laporan (*report*).

c. Metode-metode otomatis (*automatic methods*).

d. Inspeksi pengujian (*test*) dengan mengambil sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Secara terperinci dapat diuraikan langkah-langkah proses pengawasan sebagai berikut:

a. Penentuan standar sebagai dasar pengawasan

Standar adalah suatu ukuran yang dinyatakan dalam bentuk yang ditetapkan terlebih dahulu.

b. Pengukuran penampilan (*performance*)

Pengukuran penampilan anggota

organisasi akan menimbulkan manfaat berupa penyediaan informasi-informasi yang faktual. Pelaksanaan langkah pengukuran penampilan (*performance*) ini meliputi kegiatan-kegiatan:

- 1) Observasi atau pengamatan terhadap para anggota organisasi secara individual.
- 2) Wawancara dengan para anggota tersebut.
- 3) Menelaah laporan-laporan tertulis tentang hasil yang dicapai.
- c. Menganalisis, mengemukakan pendapat, dan mengevaluasi *performance*, dibandingkan dengan standar.
- d. Mengambil tindakan-tindakan perbaikan

Apabila ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di luar batas yang diizinkan, maka diperlukan adanya tindakan-tindakan perbaikan (Wujayanti, 2012:37-38).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis.

F. Pembahasan

1. Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Tahun 2017

Penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengawasan serta faktor-faktor penghambat dalam

pengawasan yang terjadi di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera oleh menggunakan teori yang dikemukakan oleh Usman Efendi.

a. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan memiliki kegunaan sebagai acuan agar segala sesuatu yang dilaksanakan terarah serta tidak menimbulkan kerugian yang berdampak terhadap keterbelangungan suatu pekerjaan.

Aturan-aturan yang telah dibuat oleh Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera dalam proses pencairan dana adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme penyaluran dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera.
- b. Alur verifikasi dan pencairan pinjaman Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera.
- c. Proposal persyaratan pinjaman pemanfaat perorangan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera.
- d. Proposal persyaratan pengajuan pinjaman Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera.
- e. Ketentuan mengenai besaran pinjaman, masa pengembalian dan jasa Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera.

Dalam melakukan pencairan dana pinjaman pihak Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera telah menetapkan ketentuan tentang pengajuan pinjaman dalam bentuk proposal persyaratan pinjaman

pemanfaat, dan besaran pinjaman, masa pengembalian dan jasa.

Proposal persyaratan pengajuan pinjaman pemanfaat terdiri dari:

- a. Mengisi formulir surat permohonan pinjaman.
- b. Berdomisili tetap di kelurahan minimal 3 tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 2 lembar.
- c. Melampirkan foto usaha pemanfaat, foto agunan, foto pemanfaat 3x4 cm, masing-masing sebanyak 4 lembar.
- d. Mengisi formulir rencana usaha pemanfaat.
- e. Bagi calon pemanfaat yang mengajukan usulan pinjaman dibawah Rp 15.000.000,- dengan masa pengembalian pinjaman maksimal 24 bulan, dan bagi calon pemanfaat yang mengajukan pinjaman diatas Rp 15.000.000,- sampai dengan Rp 30.000.000,- dengan masa pengembalian maksimal 36 bulan, melampirkan surat rekomendasi dari lurah.
- f. Bagi calon pemanfaat yang mengajukan usulan pinjaman diatas Rp 30.000.000,- sampai dengan Rp 60.000.000,- melampirkan surat rekomendasi dari lurah dan SIUP.
- g. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta/BUMN bersedia membuat surat pernyataan kesediaan pemotongan penghasilan (gaji/insentif) untuk pembayaran angsuran dengan bermaterai Rp 6.000,

Ketentuan mengenai besaran pinjaman, masa pengembalian dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang mengajukan pinjaman pertama dapat diberikan pinjaman dengan batas maksimal Rp 30.000.000,-.

- b. Bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman berikutnya dan dinilai disiplin melakukan pembayaran angsuran dapat diberikan pinjaman maksimal Rp 60.000.000,-.

- c. Pinjaman yang digunakan pemanfaat perorangan dan kelompok usaha dibebankan jasa pertahun sebesar maksimal 10%.

- d. Pinjaman yang digunakan pemanfaat perorangan dan kelompok usaha kategori masyarakat miskin dibebankan jasa pertahun maksimal 6%.

Hasil wawancara yang diambil baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis maupun pihak Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera menunjukkan bahwasannya belum ada penetapan standar pelaksanaan mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis. Hal ini berdasarkan ungkapan bahwasannya dalam melakukan pengawasan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis hanya berpedoman kepada aturan yang telah dibuat apakah sudah dilaksanakan pada saat pencairan dana, dalam hal ini ada 5 aturan yang telah dibuat oleh Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera dalam hal pencairan dana.

b. Penentuan Pengukuran dan Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ditujukan agar dalam melakukan kegiatan pengawasan seluruh sumber daya terutama sumber daya manusia yang terlibat baik itu yang melakukan pengawasan maupun yang

diawasi dapat berperan secara baik, sehingga alasan karena ketidaksiapan dikarenakan mengerjakan tugas yang lain dapat dihindari.

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan dengan 2 cara yaitu:

- a. Berkunjung langsung ke lokasi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebanyak 1 kali dalam setahun bahkan ada yang tidak dikunjungi.
- b. Melalui telepon yang dilanjutkan dengan pengiriman data melalui e-mail, jasa pengiriman barang, ataupun diantar langsung.

Penggunaan telepon sebagai media dalam pengawasan dilakukan dikarenakan keterbatasan aparatur yang melakukan pengawasan yang juga mengerjakan tugas-tugas lainnya, serta ada beberapa informasi tambahan yang dibutuhkan setelah dilakukan kunjungan.

c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah melakukan proses pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilakukan, proses ini dapat berupa pengamatan, analisa laporan, metode-metode otomatis, inspeksi pengujian dengan mengambil sampel.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) termasuk Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Perdana Mandiri Sejahtera adalah langsung mengadakan pengecekan di lapangan. Aparatur yang telah ditunjuk mengadakan kegiatan pengambilan data terlebih dahulu di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang dilanjutkan dengan mendatangi secara acak dan hanya bersifat sampel para penerima dana. Terhadap para penerima dana dilakukan pengecekan biodata, wawancara seputar usaha, pengecekan visual usaha serta laporan keuangan usaha. Sedangkan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) hanya bersifat mendampingi dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.

d. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan (Usman Effendi, 2011:54-55).

Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera didapatkan hasil bahwasannya diantara ada standar pelaksanaan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan praktik yang dilaksanakan. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah jumlah pinjaman yang diberikan terlalu besar

dibandingkan dengan kemampuan peminjam menjalankan usaha, rencana usaha dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan, dan dana yang dicairkan ada sebagian yang digunakan untuk keperluan pribadi.

e. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Pengambilan tindakan koreksi tentunya dilakukan pada pelaksanaan kegiatan dengan sifat keterbelanjutan. Pengambilan tindakan koreksi dilakukan agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya tidak dijumpai lagi kesalahan yang sama pada pelaksanaan sebelumnya sehingga nilai kemanfaatan serta tujuan dapat diperoleh secara maksimal.

Pengambilan tindakan koreksi sebagai bagian dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera adalah dalam melakukan proses pemeriksaan berkas pinjaman agar lebih teliti sehingga semua pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

2. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Tahun 2017

Dalam melakukan pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan

Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera tahun 2017, ada beberapa kendala yang merupakan hambatan yang secepatnya telah mendapat langkah penanganan sehingga esensi dari tujuan dilakukan pengawasan masih dapat dicapai. Berikut adalah faktor-faktor penghambat tersebut:

a. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan merupakan acuan bagi pelaksana dalam melakukan setiap tindakan di suatu kegiatan. Dengan adanya acuan tersebut diharapkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaksana berjalan efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang maksimal.

Ternyata dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap setiap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) termasuk Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera belum menetapkan standar pelaksanaan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis hanya mengacu kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

b. Sumber Daya Manusia

Pengawasan yang intens dan berkesinambungan akan membawa dampak positif bagi berjalannya suatu program mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan pengawasan diharapkan dapat diketahui kesalahan yang terjadi, sehingga dapat sesegera mungkin langkah perbaikan dilakukan serta tidak terulangnya kesalahan yang

telah dilakukan.

Pengawasan yang intens serta berkesinambungan harus dilakukan tidak hanya sekali dalam setahun serta dilakukan oleh sumber daya manusia yang fokus terhadap perihal tersebut. Keterbatasan tentang sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis menyebabkan pengawasan turun langsung ke lapangan yang dilakukan terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) termasuk Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera berjalan satu kali, bahkan ada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tidak dilakukan pengawasan turun langsung ke lapangan tersebut.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Tahun 2017 belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat diantaranya sebagai berikut: Belum ada penetapan standar pelaksanaan mengenai pengawasan yang dilakukan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam melakukan pengawasan dengan 2 cara yaitu: berkunjung langsung ke lokasi dan melalui telepon yang dilanjutkan

dengan pengiriman data melalui e-mail, jasa pengiriman barang, ataupun diantar langsung. Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah langsung mengadakan pengecekan di lapangan. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang dilakukan didapatkan hasil bahwasannya ada standar pelaksanaan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan praktik yang dilaksanakan. Pengambilan tindakan koreksi adalah dalam melakukan proses pemeriksaan berkas pinjaman agar lebih teliti sehingga semua pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Adapun faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Tahun 2017 adalah belum ditetapkannya standar pelaksanaan dan keterbatasan sumber daya manusia.

H. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat saran yang akan peneliti berikan baik pada lembaga/balai dan juga penelitian selanjutnya.

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis mempersiapkan dan menetapkan standar pelaksanaan.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis menambah jumlah aparatur/pegawai yang melakukan pengawasan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).
3. Aparatur/pegawai Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis dipersiapkan untuk fokus kepada satu bidang tugas yaitu pengawasan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

I. DaftarPustaka

Buku.

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung:Alfabeta
- Effendi, Usman. 2011. *Asas Manajemen*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Fahmi, Irham. 2017. *Manajemen Kepemimpinan Teori&Aplikasi*. Bandung:Alfabeta
- Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Adminstrasi dan Manajemen*. Jakarta:Gunung Agung
- Manulang. 2004. *Manejemen Personalia*. Jakarta:Gahlia Indonesia
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen Konsep Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta:STIE YKPN
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV.Alfabeta
- Syafiie, Inu kencana. 2003. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*. Jakarta:PT Perca
- Wijayanti, Irene Diana Sari. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta:Nusa Medika

Skripsi

- Jefrizal. 2013. *Peranan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Kurniawan, M.Ryan. 2015. *Evaluasi*

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014. Pekanbaru:Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

- Lusiana. 2013. *Efektifitas Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kepada Masyarakat Di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru:Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Mazdaviyaya, Tengku Khasenda. 2009. *Analisis Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan*. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Wahid, Iqbal. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai Tahun 2012*. Pekanbaru:Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkalis

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52
Tahun 2011 Tentang Teknis Program
Pemberdayaan Desa Kabupaten
Bengkalis

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49
Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bengkalis

Sumber – Sumber Lain :

www.ojk.go.id/id/kanal/iknb